

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

Rizky Ilhami

Program Studi Ilmu Administarsi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pasundan

rizky.ilhami@unpas.ac.id

Abstract

The West Java Provincial Government has set out to develop the West Java International Airport (BIJB) in Kertajati Subdistrict, Majalengka Regency and to become the spatial layout of the surrounding area integrated into an airport city (aeorocity). This study discusses the development of an airport city or aerotropolis based on the literature study research method (meta analysis) which is then associated with the Kertajati spatial concept. In community empowerment (people empowerment) to increase the ability to choose and open opportunities to choose meaningful means is to increase the ability to make decisions and open opportunities to participate in decision making. The community empowerment strategy, in the Majalengka District Medium-Term Development Plan (RPJMD), has made several efforts to develop the regions and communities in the BIJB region by making policies or regulations that are in line with plans and policies related to BIJB development and Kertajati Aerocity, the RTRW and RDTR which is still a legal process.

Keywords: BIJB, aeorocity, aerotropolis, strategy, community empowerment.

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan untuk mengembangkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dan menjadi tata ruang kawasan sekitarnya terintegrasi menjadi kota bandar udara (*aeorocity*). Penelitian ini membahas pengembangan sebuah kota bandar udara atau aerotropolis berdasarkan metode penelitian studi literatur (meta analisis) yang kemudian dikaitkan dengan konsep tata ruang Kertajati. Di dalam pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) untuk meningkatkan kemampuan memilih dan membuka kesempatan memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Strategi pemberdayaan masyarakat yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan daerah serta masyarakat yang ada di kawasan BIJB dengan membuat kebijakan atau peraturan yang selaras dengan rencana dan kebijakan terkait pembangunan BIJB serta Kertajati Aerocity yakni RTRW dan RDTR yang masih proses legalitas.

Kata kunci: BIJB, aeorocity, aerotropolis, strategi, pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana dengan baik akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar daerah pembangunan infrastruktur sebab akan mempermudah segala aktivitas masyarakat utamanaya di bidang ekonomi. Infrastruktur yang sering dibuat oleh Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain adalah Jalan Tol, Jembatan, Terowongan, Pelabuhan hingga Bandara yang bertujuan memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk beraktivitas.

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 45 Juta jiwa dan berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta tentunya mengalami pembangunan yang lebih cepat bila dibanding daerah lain. Ditambah dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang dikenal memiliki aktivitas yang melewati batasan wilayah yang membuat perlu adanya sarana transportasi yang dapat menunjang tingginya mobilitas masyarakat Jawa Barat. Salah satu sarana transportasi yang paling diminati oleh masyarakat ialah transportasi udara, ini disebabkan waktu tempuh yang cepat dan efektif. Ironisnya, jika melihat tingginya minat masyarakat Jawa Barat terhadap kehadiran transportasi udara. Justru infrastruktur penunjang utama yakni berupa bandara masih minim di wilayah sebesar dan sepadat Jawa Barat. Hanya bandara Husein Sastranegara yang berada di Kota Bandung yang dapat dikatakan menjadi satu satunya

bandara yang menopang tingginya aktivitas masyarakat di wilayah Jawa Barat. Perlu dicatat juga bahwa bandara Husein Sastranegara juga menyatu dengan Lapangan Udara yang terdapat pesawat-pesawat militer milik TNI AU Republik Indonesia. Ditambah letaknya yang berada di pusat kota yang membuat riskan pesawat-pesawat yang akan mendarat di bandara Husein Sastranegara.

Oleh sebab itulah, Pemprov Jawa Barat sejak tahun 2002 mencanangkan untuk membangun bandara baru di wilayah Jawa Barat yang berfokus pada penerbangan komersial yang dapat menggantikan keberadaan bandara Husein Sastranegara yang sudah *over capacity*. Setelah melakukan beberapa kajian di beberapa wilayah di Jawa Barat. Akhirnya menurut Keputusan Menteri Perhubungan no 34 tahun 2005 sesuai studi kelayakan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat menetapkan bahwa Kecamatan Kertajati di Kabupaten Majalengka menjadi lokasi pembangunan bandara bertaraf Internasional yang diberi nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Pembangunan BIJB di Kertajati, Majalengka bertujuan untuk menanggapi keinginan masyarakat serta untuk pengembangan daerah di Jawa Barat utamanya wilayah “CIAYUMAJAKUNING” yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2010. Untuk mendukung BIJB. Pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung yakni jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) serta jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang dapat memperpendek waktu tempuh antar wilayah dan pariwisata yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan

Mansuia (IPM) di Kabupaten Majalengka.

Seperti proyek-proyek pembangunan lainnya, Pembangunan BIJB tentu terdapat permasalahan yang dihadapi. Seperti apabila dilihat dari aspek penetapan lokasi yang dianggap tidak tepat sebab jaraknya yang terlalu jauh dari Kota Bandung yang merupakan pusat segala aktivitas mulai dari ekonomi, bisnis, perdagangan, investasi, politik hingga kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, pembangunan BIJB menggunakan lahan subur di kawasan Kertajati sekitar 1.800 Ha yang menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat Kertajati sebagai lahan pertanian. Adanya BIJB ini juga menimbulkan dampak urbanisasi. Yakni perubahan dari yang awalnya bersifat pedesaan (*rural*) menjadi perkotaan (*urban*). Sebab dengan hadirnya BIJB yang menjadi di Kertajati, tentu akan membawa perubahan seperti modernisasi di kawasan Majalengka, banyaknya masyarakat yang akan menuju BIJB tentu membuat daerah ini akan menjadi ramai dan sesak. Dan hal ini juga pasti membuat orientasi ekonomi masyarakat Majalengka ikut berubah. Dari yang awalnya menggantungkan nasib dengan menggarap lahan pertanian berubah menjadi wirausaha yang lebih modern. Sebenarnya, Pemkab Majalengka telah membuat konsep untuk menghadapi dampak ini. Yakni dengan membagi wilayah Majalengka menjadi dua bagian, yakni wilayah utara dimana BIJB dibangun akan menjadi wilayah pengembangan industri dan komersil, dan wilayah selatan yang menjadi wilayah konservasi dimana kegiatan-kegiatan yang tergolong tradisional seperti bertani, berkebun, berternak dll dipusatkan dan dikembangkan oleh Pemkab Majalengka.

Kehadiran BIJB di kawasan Kertajati membuat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus membuat pilihan. Apakah akan tetap menjadi petani dan pindah ke wilayah selatan yang menjadi daerah konservasi atau tetap tinggal di kawasan Kertajati dengan konsekuensi mengubah pola pikir dari petani ke industri. Oleh sebab itulah pemerintah perlu membuat strategi untuk mempersiapkan dan membantu masyarakat agar dapat merubah dan beradaptasi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan BIJB di Kertajati yang mengubah daerah tersebut dari pedesaan menjadi perkotaan. Karena itulah penyusun ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang kami lakukan dalam penulisan jurnal ini adalah Studi Pustaka, Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan studi pustaka pun tidak sembarangan. Tidak semua tulisan hasil penelitian dapat dijadikan acuan. Beberapa yang umum dan layak digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya (lebih disarankan karya akademisi), jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan studi literatur, seperti mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur.

Pembahasan

Konsep Aerocity

Di awal pengembangan bandar udara, penerimaan uang umumnya hanya

didapat dari kegiatan penerbangan, khususnya perpindahan penumpang dan barang. Walaupun demikian arah dari globalisasi dan liberalisasi menciptakan kompetisi yang sangat ketat antara bandar udara, khususnya pada bandara utama. Untuk menjaga daya saing diperlukan penerimaan yang lebih besar dan di dapat dari kegiatan-kegiatan yang bukan berkaitan langsung dengan penerbangan (*non -aviation revenue*) dan hal ini menjadi suatu keharusan di dalam bisnis bandar udara (Kratzch dan Sieg, 2011). Akibatnya, bandar udara melakukan metamorphosis dengan menggandeng lingkungan sekitarnya menjadi sebuah kota bandara (*aerocity*) dan bahkan diperluas dalam skala regional menjadi sebuah aerotropolis (Kasada, 2010).

Metamorphosis ini telah menjadikan arah strategi pengembangan bandar udara untuk memudahkan stimulasi investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan aktivitas bisnis (Stenvert dan Penfold, 2007). Timbal baliknya adalah akan meningkatkan jumlah penumpang yang memilih bandar udara tersebut. Sebagai contoh, bisnis berhubungan dengan penerbangan dan bandara akan lebih menyukai berlokasi di dekat kota yang telah dirancang berdampingan dengan sebuah bandar udara atau *aerocity/aerotropolis*. Konsep ini terwujud bila pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pelaku bisnis terkait mendukung untuk terciptanya sebuah *aerocity* (Gi-Tae et.al, 2013).

Sebagai contoh pengembangan Bandar Udara Icheon (ICN) di Korea Selatan merupakan bagian dari kawasan otoritas IFEZ (*Incheon Free Economic Zone*) yang merupakan aerotropolis berupa aglomerasi 4 wilayah (Songdo City, Yeongjong International City, Cheongna District dan Kawasan Bandar

Udara Incheon). Konsep sebuah *aerocity* dan aerotropolis atau kota bandara akhir-akhir ini dipromosikan oleh berbagai makalah akademik maupun tulisan komersial, dan yang paling menonjol konsep ini ditawarkan oleh Karsada (2004, 2005a dan 2005b).

Pengembangan Kertajati Aerocity diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal di Jawa Barat khususnya di bagian timur; mengoptimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; mempercepat perkembangan daerah Metropolitan Cirebon Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; substitusi impor dengan membangun industri strategis nasional, mencakup industri aviasi, industri farmasi, dan sebagainya; meningkatkan penerimaan pemerintah; serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk 400.000 ribu orang baik di dalam maupun di luar kawasan Kertajati Aerocity.

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) meningkatkan kemampuan untuk memilih dan membuka kesempatan untuk memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri (Saut M. Lubis, 2000:22). Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau mendalam yakni mempunyai arah ke suatu proses pemampuan, serta lebih memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakkan roda

pembangunan. Ide atau buah pikiran untuk menggerakkan motor pembangunan harus disertai dengan kekuatan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat harus mampu memberikan jaminan sehingga mereka dapat berperan. Sebagai bahan untuk dapat lebih berkembang masyarakat harus mampu memahami potensi yang dimiliki (Sujali, 2001:3). Sementara itu menurut Irwin, pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai kontribusi khusus dalam bentuk wawasan, ketrampilan-ketrampilan, energi tertentu atau dalam bentuk memberikan perhatian kepada sesama (L. Hayar Satar, 2002:21).

Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai keetrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.

Berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat desa harus ditujukan untuk membentuk kemandirian. Bantuan ekonomis saja tanpa didukung kemampuan maupun kemauan untuk maju akan kurang bermanfaat. Setelah bantuan tersebut habis kegiatan pembangunan akan berhenti. Masyarakat yang mandiri memiliki kemampuan tidak saja untuk menikmati namun juga melestarikan dan secara terus menerus mengembangkan hasil pembangunan

sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kemandirian merupakan suatu tekad dan keyakinan yang berproses mulai dari mengenal dan menyadari keberadaan manusia sebagai individu, maupun sebagai kelompok masyarakat dan mengenal lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat (I Nyoman Bharata, 1981:122).

Terbentuknya kemandirian berawal dari partisipasi, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka memahami manfaat yang akan diperoleh dari suatu program untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu maka masyarakat perlu dilibatkan sejak awal kegiatan. Hal ini juga penting untuk menumbuhkan perasan ikut memiliki program yang bersangkutan yang selanjutnya akan mendorong mereka untuk meneruskan dan mengembangkannya.

Agar pembangunan masyarakat desa mencapai keberhasilan, masyarakat desa didudukan sebagai pelaku utama karena merekalah yang paling tahu kondisi yang ada diwilayahnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu dampak pembangunan yang dihasilkan akan dirasakan sendiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Inti kegiatan pemberdayaan adalah

membina mereka agar dapat mengidentifikasi sendiri masalahnya serta menggali potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraannya.

Metode Peberdayaan Masyarakat

Masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunannya secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, yang lebih populer dengan sebutan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) (L. Hayat Satar, 2002:13).

Agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan atau pemilihan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan program akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat.

Strategi dengan pendekatan dan metode yang sangat ini dikembangkan adalah metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagai, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa membuat rencana dan bertindak atau dapat diaktakan “dari, dengan dan oleh” masyarakat desa. Secara lebih luas PRA meliputi analisis, perencanaan dan tindakan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam PRA adalah :

- a) Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penjabaran dan pemahaman oleh masyarakat desa, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.
- b) Kesadaran dan tanggungjawab diri yang kritis, artinya fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik.
- c) Saling berbagai informasi dan gagasan antara masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda (Roberts Chambers, 1996:19).

Potensi Bandara Internasional Jawa Barat

Desa Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dipilih pemerintah menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari hasil kajian, tanah bekas lahan persawahan seluas 1.800 hektare tersebut dianggap menjadi lokasi strategis sebagai pusat arus lalu lintas udara internasional. Secara demografis, wilayah Kecamatan Kertajati di Kabupaten Majalengka dianggap menjadi titik temu pelintasan dari berbagai daerah pusat ekonomi, seperti Jakarta, Bandung, dan Karawang. Kertajati, Majalengka pun dinilai strategis dengan rencana pemerintah pusat mengembangkan potensi ekonomi di tiga kawasan di Jawa Barat. Pertama, Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu (Ciyumajakuning).

Kedua, kawasan Bandung Raya, meliputi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Ketiga, kawasan Bodebekkarpur meliputi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta. Adanya BIJB tersebut dianggap sangat strategis untuk mendongkrak perekonomian dari mobilitas arus masuk-keluar orang dari berbagai daerah di Indonesia, maupun luar negeri. BIJB dianggap bisa akan menjadi penghubung transportasi logistik dari dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan Pelabuhan Patimban, Subang. Dari Pelabuhan Cirebon ke Bandara Kertajati, hanya berjarak 59 Km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Sedangkan jarak tempuh dari Pelabuhan Patimban hanya memakan waktu 1 jam 30 menit.

Secara geografis, lahan yang digunakan untuk pembangunan BIJB Kertajati adalah bekas lahan persawahan. Lahan pertanian di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati tergolong sebagai lahan tadah hujan. Lahan pertanian tersebut tidak cocok untuk ditanami padi saat musim kemarau, sehingga tidak produktif menghasilkan padi dalam waktu jangka panjang. Faktor lain dipilihnya Kabupaten Majalengka menjadi lokasi pembangunan Bandara Internasional Kertajati adalah alasan pendapatan ekonomi daerah. Secara demografis, Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Majalengka tergolong rendah dibandingkan dengan daerah sekitar, khususnya di wilayah Ciayumajakuning. Sehingga, setelah BIJB beroperasi secara optimal dan menjadi bandara kelas internasional, tentu dapat memberikan dampak

pembangunan ekonomi warga Kabupaten Majalengka.

Strategi Memberdayakan dan Mengembangkan Kawasan dan Masyarakat Kertajati

Penggunaan lahan di Kecamatan Kertajati yaitu didominasi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kecamatan Kertajati sangat kental nuansa pedesaan, hasil bumi yang ditanam akan dipanen menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Pusat pusat permukiman yang ada di Kecamatan Kertajati sudah tersebar tetapi tidak berpola. Terdapat sarana perekonomian diantaranya bank, pasar tidak permanen, rumah makan dan pertokoan memanjang linier mengikuti jalan utama Kecamatan Kertajati.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengembangkan daerah serta masyarakat yang ada di kawasan BIJB dengan membuat kebijakan atau peraturan yang selaras dengan rencana dan kebijakan terkait pembangunan BIJB serta Kertajati Aerocity. Diantaranya adalah RTRW dan RDTR yang masih proses legalitas.

(1) RTRW Kabupaten Majalengka Bandara Internasional Jawa Barat yang ditetapkan di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Bandara Internasional dibuat sedemikian rupa untuk mendukung kepentingan strategis kawasan yang berada di sekitarnya. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk :

- a. Mengembangkan kawasan Bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan bandara;
- c. Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya;4) Kerjasama dengan pihak swasta;
- d. Mengembangkan dan memberdayakan potensi bandara;

(2) RDTR Kecamatan Kertajati
Indikasi Program Perwujudan Kawasan yang Diprioritaskan Penanganannya di Kecamatan Kertajati meliputi:

- a. Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat
- b. Kawasan Penunjang Kegiatan Bandara Internasional Jawa Barat (Aerocity) di Desa Kertasari, Desa Palasah, Desa Mekarjaya, program penanganan kawasan ini adalah pengembangan sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan Bandara Internasional Jawa Barat, selain itu penanganan lainnya adalah:

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan atau pedoman rancang kota untuk:
 - Kawasan Industri Teknologi Tinggi;
 - Kawasan Business/Komersial;
 - Kawasan Perumahan relokasi maupun penunjang BIJB;
 - Kawasan Rekreasi/wisata;
 - Kawasan yang diperuntukkan untuk Central Park.
- Penyusunan Rencana Pengembangan Prasarana Terpadu Kawasan Aerocity.

3) Kawasan Kegiatan Industri Terpadu, program penanganan kawasan ini adalah penyusunan masterplan pengembangan kawasan/zona industri.

4) Kawasan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, difungsikan sebagai

penanganan kawasan ini adalah pengendalian perumahan, pertanian berkelanjutan, pengendalian banjir, irigasi teknis, arahan program penanganan untuk kawasan ini adalah:

- Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman
- Penataan kawasan perumahan dan permukiman yang sudah ada
- Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penyiapan prasarana dan sarana dasar
- Perbaikan kualitas lingkungan dan infrastruktur
- Peningkatan prasarana dan sarana transportasi khususnya yang dapat menunjang kegiatan pertanian lahan basah
- Upaya penanggulangan terhadap kerawanan bencana (banjir) akibat dari limpasan air sungai.
- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan masyarakat di kawasan BIJB serta untuk mengantisipasi perubahan pedesaan menjadi perkotaan, upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah

- Keterbukaan terkait pembangunan BIJB kepada masyarakat
- Kualitas SDM harus ditingkatkan dengan cara penyediaan sarana pendidikan
- Sosialisasi terkait pembangunan BIJB kepada masyarakat
- Kajian dampak perubahan sosial
- Penyediaan pelatihan pekerjaan dan pembangunan balai pelatihan
- Pemetaan tentang kompetensi ketenagakerjaan dan angkatan kerja

Terkait dengan warga masyarakat yang tergusur akibat dampak pembangunan BIJB, Pemerintah bersama PT. BIJB (Perseroda) memberikan pelatihan basic cargo agar dapat bekerja di bidang cargo BIJB. Diklat ini diberikan kepada warga Kertajati asli dan diprioritaskan bagi warga yang tidak mampu. Hal ini agar kehadiran BIJB dapat dijadikan peluang bagi masyarakat setempat.

Kemudian, agar masyarakat Kertajati dapat beralih dengan cepat yang awalnya mengandalkan sektor pertanian ke sektor Industri. Pemkab Majalengka melakukan Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon industrinya, mulai dari perkembangan (industri serat) ke intermediate (industri staple dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan ini, telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Majalengka 2011–2031, dalam rencana struktur ruang wilayah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kertajati memiliki fungsi pelayanan sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian yang meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh dan Ligung. Oleh karena itu, perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu didukung dan ditindaklanjuti.

Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan

Surat Bupati Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka. Pemerintah setempat sangat serius dalam mengatasi persoalan dan masuk dalam rencana strategis Pemkab Majalengka. Selain dari pemerintah, upaya juga dilakukan oleh PT. BIJB sebagai penanggung jawab serta pengelola BIJB dengan menegaskan bahwa Hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi baru akan terjadi di sana. Jawa Barat, lewat potensi yang dimiliki seperti sektor pariwisata, budaya, peluang tersebut harus dikelola dengan baik.

Sebab diketahui, bahwa Jawa Barat merupakan salah satu destinasi terbesar di Indonesia selain Bali. PT BIJB selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melihat jeli potensi tersebut. Salah satu caranya menggulirkan program corporate social responsibility (CSR) dengan menggandeng Karang Taruna Jawa Barat.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, CSR yang diusung dibentuk melalui rancangan program TouristPreneur. Pengembangan yang pertama adalah Karang Taruna Tourism Destination dimana nantinya Karang Taruna Jawa Barat akan bekerja sama dengan masyarakat dan dinas pariwisata setempat untuk membangun destinasi unggulan. Kedua adalah Karang Taruna Hospitality atau yang berkaitan dengan pelayanan. Nantinya mereka akan disiapkan menjadi sumber daya manusia unggul untuk membuat konsep pengelolaan. Tujuannya untuk menyiapkan

kebutuhan dasar sarana dan prasarana pengembangan wisata. Ketiga yakni Karang Taruna Jawa Barat Tour Guide. Melalui program ini SDM akan dibentuk menjadi handal dalam hal kepariwisataan. Dan terakhir adalah Karang Taruna Jawa Barat Creative Craft dimana nantinya para pemuda akan disiapkan menjadi pribadi yang terampil dan dapat membuat serta menghasilkan produk khas daerah wisata. Hal ini karena dengan adanya pembangunan BIJB akan menciptakan perkembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian timur di berbagai bidang baik ekonomi, perdagangan dan industri, investasi hingga sosial budaya yang selama ini dianggap tertinggal diantara kawasan lain di Jawa Barat. Seperti kawasan Bandung Raya, meliputi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Ketiga, kawasan Bodebekkarpur meliputi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta.

Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya pembangunan BIJB sangat membantu untuk mendongkrak perekonomian dari mobilitas arus masuk-keluar orang dari berbagai daerah di Indonesia, maupun luar negeri. BIJB bias menjadi penghubung transportasi logistik dari dua pelabuhan yaitu, Pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan Pelabuhan Patimban, Subang. Dari Pelabuhan Cirebon ke Bandara Kertajati hanya berjarak 59 Km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Sedangkan jarak tempuh dari Pelabuhan Patimban hanya memakan waktu 1 jam 30 menit.

Secara Geografis pun lahan yang digunakan adalah bekas lahan persawahan, lahan pertanian di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati yang tergolong sebagai lahan tadah hujan. Lahan pertanian tersebut tidak cocok untuk ditanami padi saat musim kemarau, adapun faktor lain dipilihnya Kabupaten Majalengka menjadi lokasi pembangunan Bandara Internasional Kertajati adalah pendapatan ekonomi daerah. Secara demografis, Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Majalengka tergolong rendah dibandingkan dengan daerah sekitar.

Warga masyarakat yang terdampak akibat dampak pembangunan BIJB, Pemerintah bersama PT. BIJB (Perseroda) memberikan pelatihan basic cargo agar dapat bekerja di bidang cargo BIJB. Hal ini agar kehadiran BIJB dapat dijadikan suatu peluang bagi masyarakat setempat.

Penyusun menyarankan agar pihak pihak terkait baik dari pemerintah maupun pengelola agar dapat memperhatikan keadaan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan BIJB ini, sudah seharusnya pemerintah untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait perubahan yang akan terjadi di Kertajati seperti alih dari fokus ekonomi dari pertanian menuju ke industri modern. Tentu perlu adanya pemberdayaan, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar saat BIJB sudah beroperasi secara maksimal dan optimal, kehidupan masyarakat juga dapat ikut terangkat dan tidak menjadi tamu di rumah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018, Bappeda Jawa Barat.
- Syarifuddin., Pnematica, N., Juniarsih N., Rasyidi, M. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok Praya. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1, 57-70.
- Zuliyah, S. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. Journal of Rural and Development*, 1, 155-160.
- Misbakh. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Jurnal Logika*, 12, 134-155.
- Tjahjono, T., Yuliaty, E., (2017). *Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Potensi Kertajati Sebagai Aerocity, Jurnal Perhubungan Udara*, 43, 43-50.
- Damaryanti, Y., Krisnani, H., Budiarti, M. *Keberadaan Masyarakat Pendatang di Desa Sukakarta (Perubahan Sosial Budaya Masyarakat terkait Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka). Prosiding KS : Riset & PKM*, 3, 1-154
- <https://bijb.co.id/>
<http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kabupaten-majalengka-tahun-2014-2018/>
<http://jdih.majalengkakab.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Peraturan-Daerah-Nomor-1-Tahun-2014-tentang-RPJMD.pdf>
<https://www.jawapos.com/jpg-today/15/04/2018/bukan-bandung-ini-alasan-bijb-dibangun-di-kertajati-majalengka/>
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/24/warga-terdampak-bijb-diberi-pelatihan-basic-cargo-399737>